

Pembelajaran 4. Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi

Sumber. Modul Pendidikan Profesi Guru

Modul 2. Perubahan Dan Kesenambungan Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Pergerakan Nasional Sampai Reformasi Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran IPS

Penulis. Fredy Hermanto S.Pd.,M.Pd.

Sumber. Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Kelompok Kompetensi F. Kajian Sejarah dalam IPS Terpadu dan Instrumen Penilaian Test.

Penulis. Yasser Awaluddin, S.E., M.Ed., Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum., Drs. Sinyamin, M.Pd.

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik. Dalam pembelajaran ini, kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai adalah guru PPPK mampu menjelaskan Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran adalah:

- 4.1. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Revolusi
- 4.2. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama
- 4.3. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru
- 4.4. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Reformasi

C. Uraian Materi

1. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Revolusi

Kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi lebih banyak diwarnai dengan pertempuran usaha mempertahankan kemerdekaan baik usaha secara fisik maupun diplomatik. Pada masa awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kondisi bangsa Indonesia masih dihadapkan pada beberapa pertempuran fisik dengan Belanda, Sekutu dan juga Jepang. Para penjajah tersebut masih berupaya ingin merebut kembali Indonesia meski telah menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan banyaknya korban jiwa yang muncul dari rakyat Indonesia.

Pada bulan September 1945 tentara sekutu mendarat di Jakarta yang kemudian membentuk komando khusus yang disebut *Aliied Forses Netherland East Indies*

(AFNEI) untuk melucuti pasukan Jepang, kehadiran mereka bersamaan dengan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Kehadiran tentara sekutu dan belanda menimbulkan beberapa pergolakan baik melalui pertempuran fisik maupun diplomati. Beberapa peristiwa tersebut antara lain:

a. Pertempuran 10 November di Surabaya

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran Surabaya melawan pasukan sekutu memang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945.

Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena adanya insiden hotel Yamato Surabaya. Dimana ketika itu orang-orang belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegman mengibarkan bendera Merah Putih Biru yaitu bendera Belanda di atas hotel Yamato di Surabaya. Bendera Belanda dapat diturunkan, dirobek bagian birunya, dan berkibarlah kembali Sang Merah-Putih. Aksi ini dipimpin oleh Koesnowibowo, anggota Angkatan Muda Kantor Kotamadya Surabaya.

Pengibaran bendera Belanda tersebut membuat kemarahan di hati masyarakat Surabaya tatkala itu. Karena hal ini dianggap telah menghina kedaulatan bangsa Indonesia dan juga kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada bulan Agustus tanggal 17 beberapa bulan yang lalu. Sehingga hal ini membuat sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki hotel Yamato dan merobek berdera belanda warna birunya sehingga tinggal tersisa warna bendera bangsa Indonesia yakni Merah Putih. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Puncaknya pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi baku tembak antara sekelompok pemuda yang menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby.



Gambar 14. Bung Tomo
Sumber : <https://bit.ly/2HphgZS>

Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Rakyat Surabaya bertekad untuk bertempur mati-matian. Hampir seluruh bagian kota Surabaya ditembaki dan dihujani bom secara membabi-buta oleh meriam pasukan Inggris. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang meninggal dan luka-luka. Perlawanan tidak berhenti, Kobaran api semangat di seluruh kota menyala nyala bak letusan gunung berapi, TKR dan Laskar serta bantuan yang aktif dari rakyat Surabaya membuat kota Surabaya terbakar. Inggris terkejut mereka mendapatkan badai api di Kota Surabaya, awalnya mereka menduga perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3hari saja, nyatanya pengerahkan persenjataan modern dan taktik perang yang mumpuni tidak membuat kota surabaya mudah untuk diduduki. Pertempuran semakin sengit dengan hadirnya para ulama, kyai dan para santri di medan peperangan. Nama nama besar seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya ikut ambil bagian dalam perjuangan dengan mengerahkan santri-santri (ketika itu masyarakat Jawa khususnya tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka sangat patuh dan taat kepada para kyai dan ulama mereka).

Sosok Bung Tomo yang merupakan seorang revolusioner menjadi api pembakar semangat rakyat Surabaya pun hingga kini terus dikenang jasa dan perjuangannya. Beliau menyuarakan pidato yang memacu keinginan rakyat Surabaya untuk mempertahankan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Bung Tomo mengatakan dengan lantang “Merdeka atau mati?” yang lantas dijawab oleh ratusan ribu rakyat dengan kata ‘Merdeka’ daripada mati sia-sia ditangan parasekutu. Tidak terduga sama sekali perlawanan bisa bertahan lama, berlangsung dari hari ke hari, minggu ke minggu. Perlawanan yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, semakin hari semakin solid dan teratur. Pertempuran dasyat ini memakan waktu. hampir satu bulan lamanya, sebelum seluruh kota jatuh ditangan pihak Inggris. Peristiwa berdarah ini benar benar membuat inggris merasa berperang dipasifik, medan perang Surabaya mendapat julukan “neraka” bagi mereka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit sekitar 1600 orang prajurit pengalaman mereka tewas di Surabaya. Dari peristiwa tersebut maka setiap tanggal 10 November di peringati sebagai hari pahlawan.

b. Pertempuran Lima hari di Semarang

Perlawanan masyarakat Semarang terhadap tentara Jepang atau sering disebut dengan istilah pertempuran lima hari di Semarang diawali dari terbunuhnya Dr. Kariadi seorang dokter muda asal Semarang dan berbagai tindakan anarkis yang dilakukan oleh tentara tahanan Jepang yang coba melarikan diri dari tahanan yang kemudian mengakibatkan kekacauan di sekitar tempat tahanan tentara Jepang. Tentara tahanan Jepang mencoba untuk mengambil alih kembali kota Semarang dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut tentu mengundang amarah masyarakat menimbulkan perlawanan rakyat Semarang terhadap tentara Jepang di berbagai daerah Semarang. Berkenaan dengan adanya berita mengenai pemberian racun pada tandon air minum di Jln. Wungkal, seorang dokter muda asal Semarang tergerak hatinya untuk melakukan penelitian mengenai tandon yang sudah di racun tersebut. Beliau bernama Drs. Kariadi yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala laboratorium di RS Purusara Semarang.

Dr. Kariadi segera berangkat ke tandon penampungan air di Jln Wungkal. Diluar dugaan mobil yang ditumpangi bersama sopirnya dicegat oleh sekelompok

tentara Jepang. Dr.Kariadi beserta sopir pribadinya ditembak ditempat. Berita kematian Dr Karia di membuat rakyat marah dan berhasil menangkap Jendral Nakamura. Pada tanggal 15 Oktober 1945, Mayor Kido meminta 100 tentara untuk melakukan penyerangan ke pusat kota mendengar berita penangkapan Jenderal Nakamura. Di Semarang juga terjadi penangkapan Mr. Wongsonegoro, Dr. Sukaryo, dan Sudanco Mirza Sidharta.Tanggal 16 Oktober 1945 pertempuran terus berlanjut dan meluas ke berbagai penjuru kota. Pada tanggal 17 Oktober 1945 terjadi kesepakatan gencatan senjata, namun kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Pada Tanggal 18 Oktober 1945 Jepang berhasil mematahkan serangan dari para pemuda dan memberikan perintah kepada pemuda untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki, malam harinya para pemuda tidak mau menyerahkan senjatanya dan memilih melanjutkan untuk melawan Jepang.Pada tanggal 19 Oktober 1945,disaat Jepang ingin menghancurkan Kota Semarang tiba-tiba datanglah tentara Sekutu di Pelabuhan Semarang dengan Kapal HMS Glenry, yang membuat Jepang kemudian menyerah sehingga berakhirilah pertempuran lima hari di Semarang.

c. Pertemuran Medan Area

Perang Medan Area merupakan suatu peristiwa dimana perjuangan rakyat Medan melawan sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Medan pada saat itu belum mengetahui dan mendengar informasi tersebut. Hal itu disebabkan karena sulitnya komunikasi dan adanya sensor dari Jepang. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan sekutu mendarat di Medan dibawah pimpinan T.E.D Kelly.Kedatangan pasukan sekutu diikuti oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintahan RI di Sumatera Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Akan tetapi, Inggris malah mempersenjatai mereka dan membentuk Medan Batalyon KNIL, yang terdiri atas seluruh tawanan yang telah dibebaskan dan dipersenjatai.

Peristiwa itulah yang melatarbelakangi terjadinya pertempuran medan area, sehingga dalam pertempuran tersebut muncullah garis demarkasi yang berasal dari perundingan Linggarjati yang dilakukan antara RI dan serdadu Inggris yang kemudian dilanjutkan oleh serdadu Belanda. Sebelum disahkannya perundingan tersebut, Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan *Fixed Boundaries Medan Area* (batas resmi wilayah Medan) diberbagai sudut kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi bagi para pemuda untuk melawan kekuatan asing yang mencoba untuk berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pematang Siantar. Pada bulan Agustus 1946 telah dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Kemudian komando inilah yang terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir diseluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap jepang, sekutu, dan Belanda.

d. Peristiwa Bandung Lautan Api

Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki Kota Bandung. Ketika itu para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tentara Sekutu menduduki dan menguasai kantor-kantor penting. Tentara NICA membonceng tentara Sekutu itu. NICA berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum (peringatan) pertama agar Kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Para pejuang kita harus menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Alasannya untuk menjaga keamanan. Apabila tidak diindahkan, tentara Sekutu akan menyerang total.

Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejenak saat itu sering terjadi bentrokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena persenjataan yang tidak memadai,

pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu. Pada tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI (Tentara Republik Indonesia) mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Perlu diketahui bahwa sejak 24 Januari 1946, TKR telah berubah namanya menjadi TRI.

Akhirnya, TRI dan para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Rakyat diungsikan ke luar Kota Bandung. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumihanguskan oleh para pejuang. Bumi hangus adalah memusnahkan dengan pembakaran semua barang, bangunan, gedung yang mungkin akan dipakai oleh musuh. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut, gugur seorang pejuang Mohammad Toha.

e. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Beberapa hasil perundingan tersebut antara lain : (1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura, (2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949, (3) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS, (4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepalaunit.



Gambar 15. Wilayah Indonesia hasil perundingan Linggarjati

Sumber : <https://bit.ly/2qPNQOn>

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresimiliter yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Dewan Keamanan PBB *de facto* mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, dan bukan *Netherlands Indies*. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai *The Indonesian Question*. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan

menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

f. Agresi Militer Belanda I

Aksi yang dilakukan ini merupakan respon Belanda atas perjanjian Linggarjati. Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dengan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. Akibat tindakan Belanda tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dari rakyat Indonesia. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo.

Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai *The Indonesian Question*. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

g. Perundingan Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok Jakarta. Pihak yang hadir pada perundingan Renville antara lain : (1) Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun, (2) Delegasi Belanda diwakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua), Mr. H..A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets, dan Mr.Dr.Chr.Soumokil, (3) PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

Isi perjanjian Renville yang disepakati antara lain: (1) Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), (2) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia, (3) Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, (4) TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.



Gambar 16. Wilayah Indonesia hasil perjanjian Renville

Sumber : <https://bit.ly/2F8T5gq>

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, mengakibatkan berbagai dampak bagi bangsa Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur,
- (2) Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, harus ditarik masuk ke wilayah RI. Di Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan ke Wilayah RI,
- (3) Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin sehingga pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden,
- (4) Perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati.

Setelah perjanjian Renville pihak Belanda rupanya belum menyerah juga, mereka masih ingin menguasai Indonesia seutuhnya, sehingga pada 19 Desember 1948 mereka melancarkan Agresi Militer Belanda II.

h. Agresi Militer Belanda II

Setelah perjanjian Renville pihak Belanda rupanya belum menyerah juga, mereka masih ingin menguasai Indonesia seutuhnya. Pada tanggal 18 Desember Belanda melancarkan agresi militer II dan pada tanggal 19 Desember 1948 ibukota RI Yogyakarta dengan mudah dikuasainya. Para pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan mengecam agresi tersebut sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan dalam bidang diplomatik (Rickefs, 1991:347).

Belanda menangkap dan menahan tokoh-tokoh RI yang tetap tinggal di ibu kota, yaitu Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muh. Hatta, Mr. Assaat (ketua BP-KNIP), Agus Salim (menteri luar negeri), Sutan Syahrir dan Ali Sastroamidjojo. Namun sebelumnya diadakan sidang kabinet dengan keputusan bahwa mereka tetap tinggal di ibu kota dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran

Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Sumatra. Namun keputusan kabinet tersebut tidak didukung oleh para perwira militer seperti Jenderal Sudirman dan T.B Simatupang.

Sementara itu, dengan dasar pertimbangan “berhubung dengan ditawannya pemimpin-pemimpin RI “ dan “ untuk “Segera dapat mengisi kevakuman pemerintahan sipil”, Panglima Tentaar Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A. H Nasution mengeluarkan maklumat no. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa, dengan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat “total”, yaitu menggunakan sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankam Rata). Menghadapi sistem dan taktik gerilya ini, Belanda merasa mendapat tekanan-tekanan dari pasukan RI. Divisi I Siliwangi yang dahulu dihijrahkan, dikembalikan ke daerah-daerah yang dahulu ditinggalkan tanpa mengenal batas-batas formal yang ditetapkan di dalam perjanjian Renville (Muhaimin, 2002:63).

i. Serangan Umum 1 maret 1949

Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan padatanggal 1 Maret 1949. Serangan bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10/Wehkreise III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta). Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan-pasukan TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relative singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta.

Dalam Serangan Umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang

menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda, berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Oleh karena desakan itu, serta kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan RI.

j. Persetujuan Roem- Royen

Pada tanggal 16 April -7 Mei 1949 mulai diadakan pembicaraan antara kedua delegasi hingga menghasilkan suatu kesepakatan. Pasal utama pembicaraan adalah mengenai kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta. Ketua delegasi Indonesia, Moh. Roem tetap pada pendiriannya bahwa persoalan tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu, sebelum pokok-pokok yang lain dibahas. Sementara Van Royen tetap berpegang bahwa persoalan itu sebagai hal yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dari lainnya

Meski terdapat pasal-pasal yang masih disengketakan, akhirnya terdapat maklumat bersama yang dikenal sebagai perundingan Indonesia-Belanda yang dikenal sebagai Persetujuan Roem Royen yang menghasilkan tiga pokok kesepakatan dari delegasi Indonesia dan juga sesuai dengan instruksi Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949 ,yaitu:

- a) Mengeluarkan perintah kepada pasukan RI untuk menghentikan perang gerilya
- b) Kerja sama yang mengarah pada pemulihan perdamaian dan memelihara ketertiban.
- c) Ikut serta dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag

Van Royen atas nama Pemerintah Belanda mengeluarkan suatu pernyataan, yaitu:

- a) Persetujuan mengenai kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta
- b) Penghentian segala operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
- c) Penghentian pembentukan negara-negara boneka atau daerah-daerah otonom di wilayah-wilayah yang berada dibawah pengawasan RI.

k. Konferensi Meja Bundar

Pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, Indonesia diwakili oleh: Drs. Hatta (ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr.Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B.Simatupang, Mr.Muwardi.Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.

Isi dari Konferensi Meja Bundar: (1) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka, (2) Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan, (3) Dibentuknya Uni Indonesia- Belanda untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat, (4) Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan- perusahaan Belanda, (5) Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang dari tahun 1942.

2. Kehidupan Bangsa Indonesia pada masa Orde Lama

a. Situasi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Masa Demokrasi Liberal adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara. Masa Demokrasi Liberal disebut pula masa Demokrasi Parlementer, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai

daerah dan jatuh banggunya kabinet. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 8kali pergantian kabinet yaitu:

1) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet ini merupakan koalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain:

- Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban
- Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
- Perbaikan institusi Angkatan Perang
- Penyelesaian Irian Barat
- Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs, 1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah:

- Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan DI/TII Kartosuwiryo).
- Kegagalan membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI
- Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan KMB, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun setelah KMB tahun 1949).

Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP no 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh.

2) Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952)

Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) untuk membentuk kabinet koalisi. Program kabinet ini adalah:

- Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif
- Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat
- Persiapan penyelenggaraan Pemilu I
- Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria
- Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.

Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada Indonesia.

3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)

Program kabinet Wilopo adalah:

- Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante, DPR dan DPRD)
- Kemakmuran, pendidikan dan keamanan
- Pelaksanaan politik bebas aktif
- Pengembalian Irian Barat dalam NKRI

Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah:

- Munculnya gerakan separatis
- Keadaan perekonomian dan politik belum membaik
- Persoalan Irian Barat belum selesai
- Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya disebabkan mereka memaksa Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution

berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara. Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan PETA dan Laskar–laskar serta Parlemen. Bahkan parlemen mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI menganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak pada presiden untuk membubarkan DPRS. Presiden Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasution dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng.

Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang mengizinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurus tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno.

4) Kabinet Ali Sastroamidjyo I (Juli 1953-Juli 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain:

- Pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi.

- Pelaksanaan perekonomiaan Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 –25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali berkeinginan mengangkat KSAD dari kelompok TNI yang anti peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Muhaimin, 2002:84). Parlemen akhirnya mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali yang dianggap tidak mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden. Meskipun menurut sistem politik bahwa yang dapat menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.

5) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Setelah berlangsung perundingan yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama (Ali I),Burhannudin Harahap (Masyumi) berhasil menyusun kabinet yang didukung oleh Masyumi,PSI dan Partai NU. Program kabinet tersebut antara lain:

- Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan Menteri Kehakiman Kabinet Ali I yaitu Jody Gondokusumo dengan tuduhan korupsi).
- Pelaksanaan pemilu I

Untuk mengurangi ketegangan dengan militer, Perdana Menteri Burhannudin mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD. Hal ini disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu.

Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 29 September 1955 memilih anggota DPR
- 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

6) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai-partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehingga terdiri atas PNI, Masyumi dan Partai NU. Program kabinet tersebut disebut dengan Rencana Lima Tahun, dengan agenda sebagai berikut:

- Perjuangan merebut Irian Barat
- Pembentukan daerah-daerah otonom
- Pemilihan anggota DPRD
- Perbaikan nasib buruh dan pegawai
- Menyehatkan keuangan negara
- Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Notosusanto, 1977:96).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kabinet dalam melaksanakan agenda pemerintahan adalah:

- Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat
- Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB
- Penyelundupan barang-barang import
- Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatera dan Sulawesi) tentang alokasi biaya pembangunan antara daerah dan pusat.

7) Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959)

Kabinet tersebut merupakan *Zaken Kabinet*, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah:

- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan

- Perjuangan merebut Irian Barat
- Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB (Notosusanto,1977:98).

Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat otoritas Sukarno serta sebagai forum tandingan bagi pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ekstra-konstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen (Mahfud M D,2000: 54).

Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu:

- Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres
- Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti
- Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang -undang.

Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Reublik Indonesia) dengan Perdana Menteriya, Syafrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). PRRI mendapat dukungan dari daerah Sulawesi dengan munculnya gerakan Permesta sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.

Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Akhirnya presiden

Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga kabinet Djuanda berakhir.

b. Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Selain itu juga penambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.

Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah:

- 1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- 2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- 3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerimabantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh:

- 1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- 2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
- 3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
- 4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- 5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- 6) Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Usaha pemerintah lainnya dalam usaha memulihkan ekonomi adalah nasionalisme perusahaan asing. Hal ini dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

Usaha perbaikan ekonomi lain yang dilakukan adalah pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
- 2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
- 3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

c. Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

Demokrasi terpimpin berawal dari peristiwa gagal nya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru. Hal ini disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante. Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamandemen dengan memasukkan kata-kata : *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” kedalam Pembukaan UUD 1945.

Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265 (menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga ekses–ekses politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik.

Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu:

- 1) Menetapkan pembubaran Konstituante
- 2) Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS
- 3) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat, TNI, Mahkamah agung serta sebagian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch 1999;44).

Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1959 yang berisi ketentuan kewajiban partai–partai politik mencantumkan AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membubarkan partai–partai politik yang terlibat dalam pemberontakan–pemberontakan. Aturan

tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis dibubarkan karena dianggap mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut :

- Ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama *United Nations Operation of Congo (UNOC)*.
- Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang menguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki organisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul *To Build The World a New* (membangun dunia baru)
- Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok
- Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (*Asian Games IV*) di Jakarta 24-4 September 1962.

Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar Negeri poros Jakarta - Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (*New Emerging Forces*) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dan Amerika Serikat. Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ekstra-konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri dan bertugas memberi nasehat pada kabinet. Untuk pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri-Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan semua menteri diharuskan melepaskan ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non-partai.

MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus 1959 tersebut menjadi "Manifesto Politik Indonesia" dan menetapkannya sebagai GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan "mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup".

Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin.

Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs, 1991:406).

Pada tanggal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda

ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga membahayakan eksistensi TNI.

Peristiwa-peristiwa yang dapat diidentifikasi sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:

- a) Adanya poros Jakarta–Peking
- b) Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI
- c).Timbulnya gagasan NEFO (*New Emerging Forces*) sebagai tandingan kekuatan negara-negara Barat (*Old Established Forces*).
- d) Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora).

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi antara kedua belah pihak.

Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak menyerahkan Irian Barat. Sebaliknya, Belanda memperkuat kedudukannya secara militer dan politik di wilayah tersebut. Para pemimpin RI dan TNI menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8 Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian KMB. Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika dalam Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957 yang salah satu agendanya membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal.

Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan radikal atau jalur konfrontasi. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambil-alih perusahaan dan aset-aset milik Belanda di Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960

Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda.

Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat dibahas kembali. Sekretaris Jenderal PBB U Thant (Myanmar) mengajukan usul kepada diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker agar mengajukan proposal penyelesaian Irian yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun. Usulan tersebut pada prinsipnya diterima pemerintah Indonesia sementara Belanda menolaknya. Belanda berencana melepaskan Irian Barat dengan membentuk Dewan Perwalian dibawah PBB dan kemudian membentuk Negara Papua Merdeka.

Sikap Belanda tersebut langsung disambut semangat konfrontasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu komando untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando rakyat), yang berisi sebagai berikut:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa

Disusun Komando Mandala Siaga (Kolaga) untuk merebut Irian Barat yang dipimpin oleh Panglima Kostrad, Mayjen Suharto yang merupakan gabungan antarangkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi RI. Operasi yang dilakukan KOLAGA dimulai dengan operasi pendahuluan yang bersifat pengintaian dan sandiyudha. Dalam operasi pendahuluan tersebut terjadi pertempuran di Laut Arafura antara satuan TNI-AL dengan pasukan Belanda yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso. Situasi yang menuju pada perang besar memaksa pemerintah Belanda melakukan kebijakan diplomasi kembali dengan Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari negara-negara Blok Barat agar berunding dengan Indonesia, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia–Belanda di New York sehingga disebut Perjanjian New York. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diusulkan Ellswort Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat (Notosusanto, 1977: 115).

Untuk penyerahan administrasi di Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada PBB dibentuklah UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Indonesia menerima kewajiban untuk melaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 31 Mei 1963 pemerintah RI menerima Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pepera. Akhirnya konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat berakhir dengan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1963.

d. Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barang konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemabrontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi. Sementara itu, PKI berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi ini disebabkan Indonesia menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme.

Pasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabilitasi perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang disebut Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya, banyak mengalami kendala-kendala.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin.

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setia tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis. Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru). Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarkan **Tri Tuntutan Rakyat** (Tritura). Puncak dari segala krisis ini adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965.

3. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru

a. Latar Belakang Munculnya Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat.

Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang adil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi.

Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Isi Tritura tersebut, yaitu:

- 1) Bubarkan PKI.
- 2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September.
- 3) Turunkan harga.

Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Perubahan ini belum dapat memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan krisis politik semakin memuncak.

Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah

11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, keesokan harinya setelah menerima Supersemar Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen. Soeharto menahkuhkan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G 30 S/PKI. Setelah itu, Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI.

Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik.

b. Situasi Politik pada Masa Orde Baru

Sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Maka dimulailah masa Orde Baru. Masa ini diawali dengan dibentuknya kabinet baru yang bernama Kabinet Pembangunan dengan tugas Pancakrida, yang meliputi :

- 1) Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Umum
- 4) Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
- 5) Pembersihan aparaturnegara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.

Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :

- 1) Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
- 2) Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
- 3) Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Dalam menyetabilkan kehidupan politik, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik. Sistem multi partai ala Soekarno memang membuka keterlibatan masyarakat dalam menjalankan haknya untuk berserikat dan berkumpul. Namun tetap saja memberikan keterbukaan dan memperuncing perbedaan dalam masyarakat atau lebih tepatnya membangun batasan-batasan pandangan politik yang memiliki potensi besar terhadap kesatuan. Soekarno tidak menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka (Robert Cribb, 2001) Ia tidak memahami bahwa masyarakat Indonesia lahir dengan ciri khas budaya masing-masing dan demikian cinta kedaerahan menjadi mutlak.

Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno dilihat sebagai cara terbaik demi terjaganya kesatuan bangsa merupakan pandangan yang keliru. Demokrasi Terpimpin hadir hanyalah untuk menjaga kekuasaan tetap berjalan. Maka sampai di sini, demokrasi dalam arti asalnya bukanlah merupakan gagasan yang penting.

Runtuhnya demokrasi terpimpin berkat pemberontakan beberapa perwira angkatan darat yang bernaung di bawah partai Komunis Indonesia (PKI) (Robert Cribb, 2001), menjadi awal pendirian Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Orde Baru merupakan hasil dari legitimasi terhadap PKI sebagai dalang pembunuhan rekan-rekan Soeharto. Dan sebutan Orde Baru hanyalah

dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan Orde Lama. Namun pada kenyataannya tetaplah sama.

Sama seperti Soekarno, menurut Soeharto, demokrasi bukanlah merupakan hal relevan bagi Bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketakutan Soeharto akan modernitas. Maksudnya adalah ketika masyarakat menjadi melek terhadap politik, stabilitas negara tergerogoti. Dengan demikian kekuasaan menjadi milik rakyat. Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan melainkan pelaksana kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan asumsi ini, penyederhanaan partai politik yang dilakukan Soeharto pada pemilu 1977 (R. William Liddle, 2001) merupakan pelaksanaan dari maksud mempertahankan kekuasaan. Artinya bahwa ketika kebebasan berpartisipasi dalam politik sebagai hak salah satu utama warga negara mampu dipersempit oleh penguasa, kekuasaan menjadi aman.

Proses penyederhanaan partai ini dilakukan dengan mengorbankan kebebasan masyarakat. Mengapa demikian? Jawabannya adalah Soeharto dengan dibantu oleh militer membangun seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang partisipasi politik dan dengan demikian memungkinkan Soeharto dan pihak militer menguasai masyarakat. Di sini, demokrasi merupakan sebuah penipuan publik. Hal ini terbukti ketika Pancasila sebagai ideologi bangsa oleh Soeharto dijadikan sebagai azas tunggal yang harus dipegang oleh semua orang Indonesia. Namun penafsiran terhadap ideologi ini hanyalah merupakan hak pemerintah.

Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)

2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).

3) Golongan Karya (Golkar)

Sistem pemilu yang hanya dibatasi keikutsertaan pada tiga partai jika dilihat secara teknis, proses jalannya pemilihan umum dilakukan secara jujur. Namun secara substantif, pihak yang diuntungkan dengan sistem tiga partai adalah tetap pemerintah. Betapa tidak dengan masa kampanye kurang dari sebulan dan peraturan membatasi kegiatan kampanye digunakan untuk menghambat partai non pemerintah. Golkar sebagai partai pemerintah paling diuntungkan dengan sistem ini. Propaganda ideologis dilakukan dengan menggelari Golkar sebagai partai politik yang mewakili kepentingan seluruh bangsa sedangkan partai-partai lainnya dikatakan mewakili hanya sebagian dari kepentingan bangsa yang besar yang bisa membawa kepada perpecahan bangsa.

Selain itu, pemerintahan Soeharto melarang PDI dan PPP mempunyai cabang di bawah tingkat kabupaten sedangkan Golkar mendapat perhatian istimewa. Ia diizinkan untuk hadir di mana pun entah di kantor pemerintah atau pun di semua desa. Pengetatan kontrol pemerintah tidak hanya sampai pada level kepartaian. Partisipasi dalam menduduki posisi legislatif pun dikontrol. Orang-orang yang mau dicalonkan partai untuk mengisi kursi legislatif terlebih dahulu diperiksa oleh pemerintah. Selain itu, adanya kewajiban pegawai negeri harus memilih Golkar dalam pemilu. Kebebasan sungguh dalam kontrol penguasa.

Pengetatan kontrol ini memungkinkan untuk dijalankan sebab adanya peran aktif angkatan bersenjata (ABRI). ABRI selain menjaga dominasi negara atas masyarakat juga membenarkan intervensi militer dalam bidang politik sipil menurut doktrin dwifungsi ABRI. Dalam bidang pemerintahan sipil, peran ABRI pun sangat menonjol yaitu dengan diangkatnya perwira entah yang aktif ataupun yang sudah pensiun untuk menduduki jabatan utama dalam struktur pemerintahan sipil. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk perlindungan dan

pengawasan. Soeharto membangun kembali keterpurukan demokrasi dipimpin dengan meletakkan di atasnya “demokrasi pancasila” yang otoriter dengan kekuatan bersenjata dalam intinya.

Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertanggungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan.

Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4. Guna mendukung program Orde Baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan dari penataran

P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.

Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

c. Situasi Ekonomi pada Masa Orde Baru

Ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi 650 % setahun, langkah pertama adalah mengendalikan inflasi dari 650 % menjadi 15 % dalam waktu hanya dua tahun dan untuk menekan inflasi Soeharto membuat kebijakan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi dalam pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan merangkul Negara-negara barat untuk menarik modal. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain:

1) Menerapkan cara militer untuk mengatasi ekonomi.

Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan sasaran yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25 – 30 tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut pelita/pembangunan lima tahun. Pedoman pembangunan adalah Trilogi pembangunan yang meliputi :

- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Delapan jalur pemerataan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan dan perumahan.
- Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Pemerataan pembagian pendapatan.
- Pemerataan kesempatan kerja.
- Pemerataan kesempatan berusaha.
- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan.
- Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
- Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

2) Memperoleh pinjaman luar negeri.

Mencari pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia.

3) Liberalisasi perdagangan dan investasi.

Caranya adalah dengan membuka Liberalisasi perdagangan dan investasi selebar-lebarnya. Inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing. Untuk menggerakkan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari US\$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US\$10,6 miliar tahun 1980.

4) Mewujudkan swasembada beras.

Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980. Sektor pertanian harus dibangun dan ditingkatkan produktivitasnya. Bertumpu pada sektor pertanian yang makin tangguh itulah, kemudian dibangun sektor-sektor lainnya. Pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, cara-cara bertani dan teknologi pertanian yang baru diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, penyediaan pupuk dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Kebutuhan pembiayaan para petani disediakan melalui kredit perbankan. Pemasaran hasil-

hasil produksi mereka diberikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras oleh pemerintah (Badan Urusan Logistik atau Bulog). Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian tadi telah berhasil mengantarkan Bangsa Indonesia berswasembada beras, menyebarkan pembangunan secara luas kepada rakyat, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

5) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara nasional yang diukur dengan Produksi Domestik Bruto (PDB). Tingkat pertumbuhan PDB selama periode 1969–1989 yang diukur atas dasar harga yang berlaku maupun menurut harga konstan menunjukkan adanya peningkatan. Sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1983 yang merupakan tahun terakhir Pelita III, tingkat rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,2% per tahun. Selanjutnya, tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama Pelita IV yang diukur dengan PDB tahun 1983 sebesar 5,2% per tahun. Berarti lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun yang direncanakan dalam Repelita IV sebesar 5,0%.

Sementara itu, tingkat pertumbuhan PDB tahun 1989 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Pelita V (1989/1990–1993/1994) adalah 7,4%, dan tahun 1990 sebesar 7,4% (tahun kedua). Dalam tahun-tahun berikutnya menunjukkan laju pertumbuhannya adalah tahun 1991 sebesar 6,8%, tahun 1992 sebesar 6,3%, dan tahun 1993 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Pelita V sebesar 6,0%. Jadi, pertumbuhan ekonomi Pelita V rata-rata adalah 6,9% per tahun. Berarti lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun yang direncanakan dalam Repelita V sebesar 5,0%.

Repelita VI (1994/1995–1998/1999) yang merupakan tahapan pembangunan lima tahun pertama dalam periode 25 tahun kedua Pembangunan Jangka Panjang (PJP II), pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dalam Repelita VI adalah rata-rata 6,2% per tahun.

4. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Reformasi

a. Latar Belakang Munculnya Reformasi

Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Gerakan Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan Reformasi. Bahkan krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan Reformasi tersebut

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan perikehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan gerakan Reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu Mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar bebas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan Reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan Reformasi.

Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi dan hukum.

Pemerintahan Orde Baru dipimpin presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan Reformasi

b. Situasi Politik pada Masa Reformasi

Di balik kesuksesan pembangunan masa Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat.

Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin

Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.



Gambar 17. Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR 1998

Sumber : <https://bit.ly/2qUPRYZ>

Agenda reformasi yang dituntut oleh mahasiswa saat itu ada enam, yakni : (1) Suksesi kepemimpinan nasional, (2) Amandemen terhadap UUD 1945, (3) Pemberantasan KKN, (4) Penghapusan Dwi fungsi ABRI, (5) Penegakan supermasi hukum, (6) Pelaksanaan otonomi daerah. Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, sebagai salah satu penguasa terlama didunia, dia cukup yakin ketika ditetapkan kembali oleh MPR untuk masa jabatan yang ketujuh pada tanggal 11 Maret 1998, segala sesuatu akan berada di bawah kontrolnya. Tetapi dua bulan sesudah Soeharto mengucapkan sumpah, Orde Baru runtuh. Ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada tanggal 19 Mei 1998, presiden yang sudah berumur 75 tahun ini menyaksikan legitimasinya berkurang dengan cepat dan ia ditinggalkan seorang diri.

Saudara dapat menyaksikan video gerakan mahasiswa pada tahun 1998 di bawah ini:

<https://www.youtube.com/watch?v=5zU5hG6-FKE>
Video gerakan mahasiswa tahun 1998

Lahirnya era reformasi diawali oleh pergerakan rakyat yang didalamnya di dominasi oleh para mahasiswa yang menuntut ada perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pemerintahan, ekonomi,

politik serta sosial budaya. Era reformasi di Indonesia merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dari tahun 1998 karena pemerintahan yang ada tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa Reformasi 98 dianggap sebagai salah satu peristiwa penting di Indonesia. Dampak dari peristiwa tersebut diantaranya ialah setelah adanya peristiwa Reformasi 1998, setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Setelah adanya peristiwa Reformasi 98, semua orang diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik, berserikat dan berkumpul. Sebelumnya pada masa pemerintah Orde Baru berkuasa, jumlah partai dibatasi hanya menjadi 3 partai saja (PDI, PPP, GOLKAR). Kegiatan berserikat serta berkumpul masa itu juga sangat dibatasi.

Soeharto memanipulasi eksistensi DPR/MPR untuk mengokohkan kekuasaan, akhirnya diberhentikan oleh lembaga yang sama lewat pernyataan pers tanggal 18 Mei 1998, oleh Ketua DPR Harmoko yang didampingi oleh Ismail Hasan Meutaherum, Fatimah Achmad, Syarwan Hamid dan utusan daerah di depan wartawan dan mahasiswa menyampaikan pernyataan bahwa pimpinan Dewan baik ketua (Harmoko) maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Akhirnya pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Indonesia.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti monopoli, dan UU Anti korupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikuti sertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.



Gambar 18. Pidato Pengunduran diri Soeharto

Sumber : <https://bit.ly/2FaHHAX>

Silahkan saudara saksikan video di bawah ini mengenai pidato mundurnya Soeharto:

<https://bit.ly/2HpEYZz>

Video mundurnya Soeharto

Pidato pengunduran diri tersebut menandakan berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Silahkan simak video berikut ini kelebihan dan kelemahan dari orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dari berbagai bidang kehidupan:

<https://bit.ly/2q7N5Qu>

Video kelebihan dan kelemahan dari orde baru

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 telah mendorong munculnya berbagai macam perubahan dalam sistem ketatanegaraan, yang merupakan dampak dari adanya Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Tahun Presiden pascareformasi. 1945 (UUD'45). Salah satu hasil dari perubahan dimaksud adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi memosisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan

lembaga-lembaga negara. Perkembangan konsep *triaspolitica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan karena dianggap tidak lagi *relevan* mengingat fakta bahwa tiga fungsi kekuasaan yang selama ini ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini kemudian mendorong negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih *responsif* dalam mengatasi persoalan aktual negara dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Sejak era reformasi tahun 1998 dicanangkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)telah mengeluarkan dua Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XI/MPR/Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dilanjutkan dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuan dari Undang-Undang ini yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penerapan prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga mengundang perdebatan hukum dan kontroversial, karena Mantan Presiden Soeharto menyerahkan secara sepi hak kekuasaan kepada Habibie. Dikalangan mahasiswa sikap atas pelantikan Habibie sebagai presiden terbagi atas tiga kelompok, yaitu: *pertama*, menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; *kedua*, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan sementara jabatan presiden tidak boleh kosong; *ketiga*, mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie adalah sah dan konstitusional. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie

mengumumkan susunan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Seiring dengan diumumkannya susunan cabinet yang baru, berarti presiden harus membubarkan Kabinet Pembangunan VII. Akhirnya gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa mampu menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan Era Reformasi mulai berjalan di Indonesia, di bawah Pemerintahan B.J. Habibie. Presiden BJ Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri atas 37 menteri, yang meliputi perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Tiga puluh tujuh menteri ini terdiri dari beberapa menteri departemen, menteri negara, sekretaris negara dan Jaksa Agung.

Beberapa kebijakan politik yang dibuat oleh presiden Habibie antara lain, memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan politik dan narapidana politik pada masa Orde Baru lewat Keppres. Presiden Habibie juga melakukan perbaikan dalam hal partai politik, diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, karena pada masa Soeharto pembentukan partai politik sangat dibatasi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan semua warga Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran.

Mulai dari diberlakukannya UU tersebut, banyak terbentuk partai-partai politik. Jumlah partai politik yang dinyatakan sah menurut keputusan kehakiman sebanyak 93 buah. Ada 48 partai diantaranya dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II pada bulan Juni 1999. Pemilu tahun 1999 berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber dan Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL (jujur dan adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu, juga netralitas birokrasi. Pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu dilaksanakan. Dalam penghitungan suara dalam pemilu terjadi perdebatan panjang. Awalnya penghitungan suara diperkirakan selesai pada tanggal 21 Juni 1999, tapi tertunda sampai tanggal 16 Juli 1999. Hanya 17 dari 48 partai politik peserta pemilu yang bersedia menandatangani hasil pemilu dengan alasan kalau pemilu belum terlaksana dengan jujur dan adil. Penolakan tersebut ditunjukkan pada rapat pleno. Presiden

Modul Belajar Mandiri

menyerahkan hasil rapat pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).



Gambar 19. Partai Peserta Pemilu 1999

Sumber : <https://bit.ly/2vAtMEX>

Pada era presiden Habibie ini masalah timor-timor yang berkejolak juga diselesaikan, Masalah Timor-Timur terjadi bentrokan senjata antara kelompok pro dan kontra kemerdekaan di mana kelompok kontra ini masuk ke dalam kelompok militan yang melakukan teror pembunuhan dan pembakaran pada warga sipil. Tiga pastor yang tewas adalah pastor Hilario, Fransisco, dan Dewanto. Situasi yang tidak amandi Tim-Tim memaksa ribuan penduduk mengungsi ke Timor Barat, ketidak mampuan Indonesia mencegah teror, menciptakan keamanan mendorong Indonesia harus menerima pasukan

internasional, meskipun hasilnya berdasarkan referendum yang dilakukan oleh rakyat timor-timor memilih untuk merdeka dan berpisah dari Indonesia.

Silahkan saudara menyaksikan video berikut ini mengenai pelaksanaan referendum di timor-timor:

https://www.youtube.com/watch?v=M81T5t_HB3g

Video referendum Timor Timur

Lepasnya timor-timor ini merupakan salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dalam sidang umum MPR. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B. J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya didepan Sidang umum MPR. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999. Dari sebelas fraksi, empat fraksi menolak, lima fraksi memintapenjelasan tambahan, satu fraksi menyerahkan sikap dan penilaiannya kepada Komisi Pertanggung jawaban Pidato Presiden dan satu fraksi menerima. Atas dasar penilaian itu, Ketua MPR Amien Rais memutuskan bahwa persoalan SU MPR akan dilakukan *votting*. Pada tanggal 19 Oktober, *votting* pun dilaksanakan dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan hasil *votting* tersebut, Sidang Paripurna XII SU MPR akhirnya menyatakan menolak pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Habibie tampaknya belum memuaskan banyak pihak sehingga banyak anggota MPR/DPR yang di dalam Sidang Umum tahun 1999 menolak hasil pertanggungjawaban Habibie, Sehingga terjadi perubahan peta politik di mana Habibie mundur setelah pertanggungjawabannya ditolak. Akhirnya pencalonan pun terpecah menjadi 2 kubu yaitu Megawati yang dicalonkan PDI-P dan Gus Dur yang dijagokan oleh Poros Tengah. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang umum MPR 1999 memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Harapan besar itu pada umumnya bersumber dari keinginan kolektif

agar kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional segera pulih kembali setelah selama lebih dari 2 tahun bangsa Indonesia terpuruk di landa krisis ekonomi dan politik yang begitu dahsyat. Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam cabinet tersebut.

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.

Setelah dilantik menjadi Presiden, Gus Dur dihadapi pada persoalan konflik di beberapa daerah di Indonesia. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan dirinya sebagai Presiden, Abdurahman Wahid. melakukan pendekatan yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurahman Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan Abdurahman Wahid. dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurahman Wahid. pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya, Presiden Abdurahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Saudara dapat menyaksikan video berikut ini sebagai suplemen pengetahuan mengenai kepemimpinan Gus Dur:

<https://www.youtube.com/watch?v=M4GA3ybbk0o>

Video dua tahun kepemimpinan Gus Dur

Selama berkuasa Presiden Gus Dur dinilai gagal menjalankan pemerintahannya. Gus Dur melakukan pemecatan anggota kabinetnya secara sepihak tanpa sepengetahuan wakil presiden, adanya kasus *buloggate* dan *bruneigate*, yang secara tidak langsung melibatkan presiden Gus Dur, kasus ini menimbulkan memorandum I dan II oleh anggota DPR yang tidak diperhatikan oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur pada saat itu memberhentikan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Menkopolam, karena tidak mau mengumumkan keadaan darurat. Amien Rais yang saat itu menjadi ketua MPR mengatakan bahwa sidang istimewa MPR dapat dipercepat dari 1 Agustus menjadi 23 Juli 2001. Sebagai bentuk perlawanan kepada DPR, Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit pada tanggal 23 Juli 2001, yang isinya antara lain: (1) membekukan MPR RI dan DPR RI, (2) mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun, (3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru. Akan tetapi dekrit ini ditolak oleh DPR melalui mekanisme *votting* dalam Sidang Istimewa MPR, karena dianggap melanggar haluan negara.

Saudara dapat menyaksikan video berikut ini mengenai penjelasan Gus Dur saat dilengserkan dari posisi Presiden Indonesia:

<https://www.youtube.com/watch?v=ACNnW9hktYE>

Video penjelasan Gus Dur mengenai posisinya saat dilengserkan dari
Presiden

Fatwa Mahkamah Agung juga menganggap dekrit tersebut tidak konstitusional, dimana kedudukan MPR dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Kemudian, berdasarkan hasil sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, Presiden Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri.

Terpilihnya Megawati menjadi Presiden Indonesia ke lima Indonesia karena posisinya sebagai wakil Presiden Gus Dur yang dilengserkan berdasarkan hasil sidang istimewa MPR, sehingga otomatis beliau naik menjadi Presiden. Pada tanggal 23 Juli 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh Megawati salah satunya membangun tatanan politik baru, yaitu dengan amandemen UUD 1945.

Dengan selesainya amandemen keempat UUD 1945, tugas pemerintah selanjutnya melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundangan yang ada dengan muatan UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain pemerintah juga menyusun peraturan perundangan yang belum dimiliki, agar amanat konstitusi bisa dilaksanakan dengan baik. Perubahan UUD 1945 ini juga memuat tentang adanya upaya untuk menyetarakan lembaga-lembaga Negara, sehingga dapat mekanisme *check and balances* yang lebih memadai, demi mendorong demokratisasi lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004 nanti merupakan agenda baru dalam politik Indonesia. Indonesia mengalami beberapa kemajuan politik, karena Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan bertugas untuk masa jabatan yang pasti.

Pada pemerintahan Megawati pula pemilu secara langsung direncanakan pada tahun 2004. Langkah awal dari pemerintahan Megawati Soekarno putri tentang partai politik adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang No 3 tahun 1999 menjadi Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang partai politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 sangat ketat, dengan demikian disiplin partai politik peserta pemilu sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU, dari 49 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu, yang memenuhi syarat hanya 24 partai politik saja. Partai politik yang

lolos verifikasi faktual dan verifikasi administrasi dinyatakan sebagai peserta pemilu.

Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah menentukan berbagai kebijakan, yaitu pertama direalisasikan desentralisasi kewenangan yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada 5 Juli 2004 diadakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih anggota legislative serta Presiden dan wakil Presiden. Pemilu tahun 2004 ini diikuti oleh 24 partai politik. Megawati yang pada saat itu menjadi Presiden, kembali mencalonkan dirinya menjadi presiden berdampingan dengan K.H Hasyim Muzadi untuk menghadapi empat pasangan calon lainnya. Empat pasangan lainnya adalah Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Hasil pemilu 2004 yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara langsung dengan dua putaran pemilu (karena pada putaran pertama tidak ada pasangan yang mendapatkan suara diatas 50%) menghasilkan pemenang, Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus menandakan berakhirnya era Megawati sebagai Presiden Indonesia.

SBY bersama pasangannya Jusuf Kalla menjadi Presiden dan pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilu. Pada pemilihan umum berikutnya pada tahun 2009, SBY juga mampu memenangkan pemilu dengan wakil yang berbeda yakni Boediono. Pada periode pertama menjadi Presiden Indonesia, SBY kemudian menyusun kabinet kerjanya yang dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu I, dan pada periode kedua kabinetnya dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Proporsi menteri yang disusun oleh SBY saat menjadi Presiden tidak semuanya berasal dari partai politik, SBY juga mengangkat menteri dari kalangan profesional yang memang sudah memiliki rekam jejak positif. Pada Kabinet Indonesia Bersatu I jumlah menteri yang diangkat sebanyak 36 menteri, sedangkan pada Kabinet Indonesia Bersatu II jumlah menteri yang diangkat sebanyak 34 menteri. Sejak tahun 2004 sistem politik Indonesia berlaku sistem kedaulatan rakyat secara penuh karena rakyat dapat memilih secara langsung anggota legislatif dan eksekutif.

Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat Indonesia itu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu rencana pembangunan lima tahunan, berdasarkan visi, misi, dan program prioritas mereka. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tiga agenda nasional yang tertuang dalam RPJMN pada era kepemimpinan SBY adalah : (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa keberhasilan dari program tersebut antara lain, penyelesaian konflik dalam negeri seperti Aceh dan Poso, penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga, peningkatan pelayanan masyarakat melalui otonomi daerah. Dalam hal pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, pada era pemerintahan SBY juga dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, mulai dari, bupati / walikota hingga gubernur sebagai bentuk implementasi dari proses demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi di Indonesia tersebut dapat berjalan secara damai tanpa adanya kekerasan pada era ini.

Pada periode pertama ini SBY melakukan dua kali pergantian posisi menteri (*reshufelkabinet*), yang pertama dilakukan pada tahun 2005 dan kedua pada tahun 2007. Pergantian menteri tersebut juga tidak lepas dari kebebasan berpendapat masyarakat pada era pemerintahan ini yang begitu luas, sehingga masyarakat dapat mengkritik, mengevaluasi serta memberikan masukan kepada SBY mengenai kinerja kabinetnya.

Pada tahun 2009 kembali dilakukan pemilihan umum, pada tahun ini partai politik yang mengikuti pemilu sebanyak 38 partai politik dan 8 partai lokal Aceh. SBY kembali mencalonkan diri menjadi Presiden untuk periode kedua. Pada tahun ini SBY berpasangan dengan tokoh non partai yakni Boediono, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan juga menteri koordinator perekonomian pada kabinet sebelumnya. Pada pemilu ini terdapat 3 pasangan

yang terlibat dalam pemilu untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya, pasangan tersebut adalah (1) SBY-Boediono, (2) Megawati Soekarno Putri-Prabowo, dan (3) Jusuf Kalla-Wiranto. SBY bersama Boediono berhasil memenangkan pemilu 2009 dengan satu kali putaran, sehingga beliau memimpin kembali Indonesia untuk periode kedua. Pada periode kedua kabinet kerja yang dibuat oleh SBY bernama Kabinet Indonesia Bersatu II, komposisi menteri yang dipilih oleh SBY merupakan kombinasi antara politisi dari partai politik dan juga profesional.

Pada tahun kedua SBY berupa melanjutkan kembali program kerjanya pada periode pertama. SBY menyiapkan 5 program pokok pada periode keduanya, program tersebut antara lain : pertama, melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kedua, melanjutkan upaya menciptakan *good government* dan *good corporate governance*. Ketiga, demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa. Keempat, melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Kelima, belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Dalam hal pemberantasan korupsi SBY juga menegaskan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), namun hal tersebut sedikit tercoreng dengan banyak tertangkapnya kader Partai Demokrat (Partai SBY berasal) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2014 kembali dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. SBY sudah tidak dapat lagi mengikuti pemilihan umum karena sudah mencapai batas akhir sebanyak dua periode memimpin bangsa ini. Pemilu tahun ini diikuti oleh 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Untuk calon Presiden yang mengikuti pemilu kali ini ada dua pasangan, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi bersama Jusuf Kalla kemudian menjadi pemenang pada pemilu 2014 ini. Pada

tanggal 20 Oktober 2014 kemudian dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

c. Situasi Ekonomi pada Masa Reformasi

Setelah terjadi pergantian presiden dari Soeharto ke presiden B.J Habibie kebijakan dalam bidang ekonomi juga mengalami perubahan. Dalam bidang ekonomi Presiden Habibie mempunyai tiga program yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang. Tujuan program jangka pendek ini untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Seperti program jaringan pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan pokok rakyat serta pengendalian harga. Dalam program jangka menengah, hal-hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha, khususnya investor luar negeri serta pengendalian laju inflasi dan berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global.

Pada 1999 terjadi kembali perubahan pimpinan di Indonesia. Presiden B.J Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau GusDur. Pada bidang perekonomian, Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US\$. Indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini ditambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama

pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurrahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset-aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional.

Pada era kepemimpinan Gus Dur terdapat peristiwa perekonomian yang mengguncang pemerintahan, yakni *bulog gate* dan *brunei gate*. Kasus *Bulog gate* begitu terkenal karena seringkali menjerat petinggi-petinggi negara. Kasus-kasus yang melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog, Sapuan. Sapuan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan terbukti bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog sebesar 35 milyar rupiah. Kasus ini pula yang mengantarkan Gus Dur lengser di tahun 2001. Setelah sebelumnya ia menerima dua kali memorandum DPR RI. *Brunei gate* adalah kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu ArioWowor.

Setelah Gus Dur lengser pada tahun 2001, posisinya kemudian digantikan oleh wakilnya, yakni Megawati Soekarno Putri. Pada saat Megawati Soekarno Putri diangkat menjadi Presiden RI yang kelima, kondisi Indonesia masih dalam keadaan krisis. Krisis ini disebabkan karena situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Banyak orang yang berpendapat, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin dalam negeri ini akan menghadapi masalah yang sangat berat, dan bagi pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah haz, masalah krisis Indonesia ini adalah tugas yang sangat berat dan harus dijalani.

Kebijakan lain yang dibuat oleh Presiden Megawati dalam bidang ekonomi antara lain : (a) memutuskan hubungan dengan IMF, (b) melakukan restrukturisas dan

reformasi keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan, (c) meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah, (d) kerjasama ekonomi dan politik diluar Amerika. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri terus mengalami kemajuan. Secara riil keadaan ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, dan tingkat pengangguran masih tinggi, namun dari sejumlah indikator ekonomi makro tampak bahwa keadaan sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruk pada lima tahun yang lalu akibat krisis ekonomi.

Megawati Soekarno Putri tidak lagi menjadi Presiden Indonesia, setelah dalam pemilihan umum pada tahun 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama pasangannya yakni Jusuf Kalla. Pada era kepemimpinan SBY membentuk kabinet yang kemudian disebut sebagai Kabinet Indonesia Indonesia bersatu I (pada periode pertama SBY memimpin bersama wakilnya Jusuf Kalla) dan Kabinet Indonesia Bersatu II (pada periode kedua SBY memimpin bersama wakilnya Boediono). Kehidupan perekonomian Indonesia bertumbuh secara positif, pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Indonesiasebesar 5% yang kemudian pada tahun 2007 mencapai 6,3%. Adanya krisis keuangan global pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan hingga hanya tumbuh 4,6% pada tahun 2009. Namun hal tersebut masih cukup baik mengingat hanya beberapaneegara saja yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif, diantaranya adalah China, India dan Indonesia. Pendapatan Domestik Bruto (PDP) Indonesia juga terus mengalami peningkatan pada era SBY memimpin yaitu naik lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 10,5 juta pada tahun 2005 hingga mencapai Rp 33,7 Juta pada tahun 2012.

D. Rangkuman

Kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi lebih banyak diwarnai dengan pertempuran usaha mempertahankan kemerdekaan baik usaha secara fisik maupun diplomatik. Pada masa awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kondisi bangsa Indonesia masih dihadapkan pada beberapa pertempuran fisik dengan Belanda, Sekutudan juga Jepang. Para penjajah tersebut masih berupaya ingin merebut kembali Indonesia meski telah menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan banyaknya korban jiwa yang muncul dari rakyat Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Lima hari di Semarang, pertempuran Medan Area, peristiwa Bandung Lautan Api, perundingan Linggajati, agresi Militer Belanda I, perundingan Renville, agresi Militer Belanda II, Serangan Umum 1 maret 1949, persetujuan Roem- Royen dan Konferensi Meja Bundar.

Masa Demokrasi Liberal adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-undang negara. Masa Demokrasi Liberal disebut pula masa Demokrasi Parlementer, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilitas pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai daerah dan jatuh banggunya kabinet. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 8 kali pergantian kabinet yaitu kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951), kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953-Juli 1955), kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957) dan kabinet Djuanda (April 1957-Juli 1959).

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: (1) menetapkan pembubaran Konstituante, (2) menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS, (3) pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Isi Tritura tersebut, yaitu: (1) Bubarkan PKI, (2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September, (3) Turunkan harga.

Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat.

Di balik kesuksesan pembangunan masa Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat.

Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai "Pahlawan Reformasi".

Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.